

**PENDISTRIBUSIAN DANA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF
DISTRIBUSI ISLAM
(Studi pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

IGA ATRIANI
NIM 1811130138

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/ 1444 H

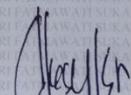
PERSETUJUAN PEMBIMBING

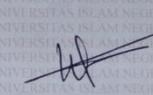
Skripsi yang ditulis oleh Iga Atriani, NIM 1811130138 dengan judul “Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, _____ Mei 2022 M
Syawal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Desi Inaini, M.A.
NIP. 197412022006042001


Khairiah El Wardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”**, oleh Iga Atriani, NIM: 1811130138, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang **Munaqasyah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Juli 2022 M / 15 Dzulhijjah 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 26 Juli 2022 M
27 Dzulhijjah 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Eka Sri Wahyuni, M.M.
NIP. 197705092008012014

Penguji I

Eka Sri Wahyuni, M.M.
NIP. 197705092008012014

Sekretaris

Kustin Hartini, M.M.
NIDN. 2002038102

Penguji II

Aan Spar, M.M.
NIP. 198908062019031008

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Sunardi, M.Ag.

NIP. 196507011993031007



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku"

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya dan atas dukungan serta do'a-do'a dari orang-orang tercinta, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bahagia serta terima kasih, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Ibu Sudiriah dan Bapak Buyung Lani. Terima kasih atas semua kasih sayang, do'a dan dukungan (moral dan material), sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kaki Ibu dan Bapak dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian. Aamiin.
2. Kepada ayukku (Yesi dan Loviana) dan adikku (Wahyu Amanah) yang telah mendo'akanku, memberi nasehat dan dukungan serta canda tawanya yang memberikan semangat utukku menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kepada Ibu Dr. Desi Isnaini, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Khairiah Elwardah, M.Ag. selaku pembimbing II, terimakasih untuk arahan, bimbingan dan kesabaran kalian dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “**Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)**”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 April 2022 M
09 Ramadhan 1443 H
Mahasiswa Yang Menyatakan



Iga Atriani
Iga Atriani
NIM. 1811130138

ABSTRAK

Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH)
dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu)

Oleh Iga Atriani, NIM. 1811130138

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana PKH pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk mengetahui apa kendala dalam pendistribusian dana PKH pada RW 09 dan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana PKH pada RW 09 dalam perspektif distribusi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendistribusian dana PKH pada RW 09 dilaksanakan dengan pendamping PKH menerima data calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dari Dinas Sosial Bengkulu, selanjutnya pendamping PKH melakukan sosialisasi, memvalidasi, dan pertemuan kelompok. (2) Kendala yang terjadi terkait dengan pendistribusian dana PKH yaitu terdapat KTP dan KK KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang tidak sinkron satu sama lain (3) Pendistribusian dana PKH pada RW 09 adalah belum sesuai dengan distribusi Islam. Karena belum memenuhi dua prinsip distribusi dalam Islam, yaitu prinsip keadilan dan pemerataan, dan prinsip solidaritas sosial, namun telah sesuai dengan prinsip persaudaraan dan kasih sayang.

Kata Kunci: *Program Keluarga Harapan, Distribusi Islam*

ABSTRACT

Distribution of Family Hope Program (PKH) Funds in the Perspective of Islamic Distribution (Study at RW 09 Kandang Mas Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City)

By Iga Atriani, NIM. 1811130138

The purpose of this study was to find out how the distribution of PKH funds in RW 09, Kandang Mas Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City, to find out what the obstacles were in distributing PKH funds to RW 09 and to find out how the distribution of PKH funds to RW 09 in the perspective of Islamic distribution. This type of research is a field research using a qualitative descriptive method. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. From the results of the study, it can be concluded as follows: (1) The distribution of PKH funds in RW 09 was carried out with PKH facilitators receiving data on prospective PKH KPM (Beneficiary Families) from the Bengkulu Social Service, then PKH facilitators carried out socialization, validation, and group meetings. (2) Obstacles that occur related to the distribution of PKH funds are that there are KTP and KK KPM (Beneficiary Families) PKH that are not in sync with each other (3) The distribution of PKH funds in RW 09 is not in accordance with Islamic distribution. Because it has not fulfilled the two distribution principles in Islam, namely the principle of justice and equity, and the principle of social solidarity, but it is in accordance with the principles of brotherhood and love.

Keywords: Family Hope Program, Islamic Distribution

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

2. Dr. H. Supardi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
4. Herlina Yustati, MA.Ek. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
5. Dr. Desi Isnaini, M.A. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Khairiah Elwardah, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan dukungan dan semangat.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini.
10. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 22 April 2022
20 Ramadhan 1443 H

Penulis,

Iga Atriani
NIM. 1811130138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	18
3. Informan Penelitian	18
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	20

5. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II KAJIAN TEORI

A. Distribusi Islam	28
1. Pengertian Distribusi dalam Islam	28
2. Dasar Hukum Distribusi dalam Islam	34
3. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam	37
4. Tujuan Distribusi dalam Islam	44
5. Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam	47
B. Program Keluarga Harapan (PKH)	53
1. Pengertian Program Keluarga Harapan	53
2. Tujuan Program Keluarga Harapan	56
3. Kriteria Penerima Manfaat PKH	57
4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH	59
5. Mekanisme Penyaluran PKH	62

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Riwayat RW 09	65
B. Visi, Misi dan Tujuan RW 09	69
C. Keadaan Sosial Penduduk	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
1. Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	71
2. Kendala dalam Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW	

09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	90
B. Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam Perspektif Distribusi Islam	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.:	Data Informan Penelitian	19
Tabel 3.1.:	Data Jumlah RT di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	66
Tabel 3.2.:	Data Persentase Agama di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	70
Tabel 4.1.:	Data Peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	73
Tabel 4.2.:	Besar Bantuan Komponen PKH	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.: Struktur Kepengurusan RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	68
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian
- Lampiran 8 : Daftar Hadir Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lengkap SKPI
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 13 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan diartikan sebagai sebuah kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial tentang kemiskinan yang bukan hanya sekedar sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat dari rendahnya kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindakkejahatan (kriminal), resiko menerima perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.¹ Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

¹ Elvira Handayani, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara”, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 19 No. 03. 2018, h. 89-90

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan, diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan suatu program jaminan sosial yang dinamai dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1. Yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.² Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, merubah perilaku rumah tangga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.³

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat membahayakan kelogisan berfikir, akhlak, keluarga, dan juga masyarakat.⁴ Islam juga mengatur tentang adanya bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Secara bahasa bahwa distribusi berasal dari kata *dulah* berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau sebutan untuk benda yang di putar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang harus diputar (didistribusikan). Adapun menurut istilah, distribusi mengandung arti pembagian atau

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, h. 3

³ Syahputra Adisanjaya, “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Riset dan PKM. Vol. 4 No.1 2017, h. 90

⁴ Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2012), h. 5

penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.⁵ Adapun instrumen distribusi pendapatan atau dikenal juga dengan nama distribusi kekayaan dalam Islam baik berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, diantaranya adalah dalam bentuk seperti pemberian zakat, infak, wakaf, waris, sedekah, hibah dan hadiah. Namun pendekatan yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah hibah. Sebagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sekarang ini adalah dalam bentuk dana hibah kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat terlepas dari kemiskinan. Sebagaimana firman Allah:

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٢٧٢﴾

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu

⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *SISTEM EKONOMI ISLAM: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, cet. I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 45

nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)” (Q.S. 2/al-Baqarah: 272)⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk suatu kebaikan, maka akan mendapat balasan dan tidak akan mendapat kerugian. Dan manusia dianjurkan untuk berinfak kepada sesama, khususnya kepada orang miskin, yang mana mereka tidak dapat berusaha atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka tidak meminta-minta.

Berdasarkan observasi awal pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, wawancara kepada Ibu Ita Hartati selaku salah satu penerima bantuan PKH di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, peneliti menemukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ini dari segi penyalurannya masih kurang merata, karena masih

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 36

terdapat masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang seharusnya dibantu, tetapi tidak mendapat bantuan PKH.⁷

RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tentunya masih terdapat permasalahan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian tidak terlepas dari adanya fenomena serta terdapat berbagai macam persoalan serta hambatan di RW 09, adapun persoalan yang berkenaan dengan PKH selama ini, seperti mengenai kevalidan data kelayakan peserta PKH. Masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai bukan miskin, sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai miskin tetapi tidak terdata atau tidak masuk calon peserta PKH. Hal ini mengakibatkan pelaksanaannya tidak sesuai pedoman dan tidak tepat sasaran. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai 6 tahun. Bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, berkewajiban mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Kemudian,

⁷ Ita Hartati, Peserta PKH, Wawancara pada tanggal 13 November 2021

bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berkewajiban mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan. Tetapi tidak jarang masih terdapat KPM yang belum mengikuti kegiatan di fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Islam telah mengatur semua secara menyeluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Salah satunya adalah tercapainya keadilan dalam pendistribusian harta, baik itu dalam kehidupan sosial masyarakat maupun individu. Dalam ekonomi Islam dijelaskan adanya prinsip distribusi yaitu salah satunya prinsip pemerataan dan keadilan. Pemerataan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Dasar karakteristik pendistribusian dalam Islam adalah adil dan jujur, karena sekecil apapun perbuatan yang dilakukan semua akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Distribusi menjadi suatu kegiatan yang penting dalam menjaga adanya keseimbangan dan keharmonisan. Tujuan terpenting dalam distribusi adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat sehingga kesamaan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena

distribusi yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas.⁸

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?
2. Apa kendala dalam pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?
3. Bagaimana pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam perspektif distribusi Islam?

⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 132

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam perspektif distribusi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang sosial mengenai distribusi, terutama distribusi dalam perspektif distribusi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti lain berikutnya yang akan

meneliti, khususnya tentang pendistribusian PKH dalam perspektif distribusi Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak dan instansi yang terkait untuk mengambil langkah yang tepat dalam pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) agar pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) lebih terlaksana secara optimal, sehingga dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Aliamsa, Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul "*Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu*". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis empiris (penelitian lapangan). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses hingga distribusi PKH di Desa Pompengan Tengah memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, sejauh ini program PKH sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala di lapangan, diantaranya data

yang digunakan data lama sehingga belum tepat sasaran.⁹ Persamaannya dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang PKH dan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Aliamsa adalah dengan pendekatan sosiologis empiris (penelitian lapangan), sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Skripsi Meltesa Rapita, Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “*Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya adalah jika dilihat dari segi pencapaian tujuan, pencapaian kurun waktu bisa dikatakan efektif dan untuk pencapaian sasaran target belum efektif,

⁹ Aliamsa, *Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu*, (Skripsi, IAIN Palopo, 2021)

dikarenakan belum sepenuhnya tepat sasaran. Dari segi integrasi dikatakan belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil, adapun dari segi adaptasi bisa disebut efektif karena bisa menyalurkan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disaat realisasinya, dan efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya adalah yang terjadi belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, karena belum terwujud tujuan sosial yang sebenarnya, dan belum adanya prinsip solidaritas sosial yang diterapkan.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang distribusi dan sama-sama jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya ialah dalam penelitian tersebut mengkaji tentang efektivitas distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH).

¹⁰ Meltesa Rapita, *Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019)

3. Skripsi Ika Irmayanti, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul “*Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Miskin Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*”. Jenis Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dan didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder). Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1. Praktek distribusi beras miskin di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa tidak memenuhi indikator keberhasilan pendistribusian raskin yaitu tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan tidak tepat harga. Berarti pendistribusian raskin di Desa Tinggimae belum maksimal/berhasil. 2. Tinjauan Ekonomi Islam dalam sistem pendistribusian raskin di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam Ekonomi Islam karena terdapat ketidakadilan dan pemerataan dalam pendistribusian raskin kepada masyarakat kurang mampu (miskin) di Desa

Tinggimae.¹¹ Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama membahas tentang pendistribusian dan penelitian lapangan. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ika Irmayanti adalah untuk membahas bagaimana pendistribusian beras miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan, sementara pada penelitian yang penulis teliti adalah lebih difokuskan tentang bagaimana pendistribusian PKH dan lebih menekankan pada perspektif distribusi Islam.

4. Skripsi Siti Paisah, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal*”. Penelitian ini menggunakan penelitian *Mixed Methods* dengan pendekatan metode campuran antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Lingga

¹¹ Ika Irmayanti, Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Miskin Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa) (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018)

Bayu kurang terlaksana secara efektif. Dikarenakan masih ditemukan adanya kurang tepat sasaran dalam penentuan/penetapan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH tidak sesuai dengan tujuan program PKH serta ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping PKH dan Peserta PKH antara lain: banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH, belum adanya kesadaran dari peserta, dan pencairan bantuan PKH yang sering tidak tepat waktu.¹² Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada tema yang mana sama-sama membahas tentang penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut lebih fokus efektivitas pendistribusiannya, namun dalam penelitian yang penulis teliti pendistribusiannya menurut perspektif distribusi Islam.

5. Skripsi Fitriyana Nurmila Sari, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden

¹² Siti Paisah, *Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal* (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019)

Intan Lampung pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Karang Anyar distribusinya tidak tepat sasaran dikarenakan data PKH menggunakan data yang lama. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa distribusi dana PKH tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam distribusi Islam karena masih adanya masyarakat yang terdorong mampu mendapatkan bantuan PKH tersebut. Distribusi dana PKH penyaluran dananya melalui rekening peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), besar bantuan yang diberikan komponen PKH berbeda-beda. Bantuan dana PKH disalurkan dalam 1 tahun dalam 3 bulan atau 4 bulan, penyaluran bantuan PKH tersebut hanya diberikan kepada masyarakat miskin saja. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran bantuan PKH, dimana masih adanya masyarakat yang terdorong mampu juga

mendapatkan bantuan tersebut, berarti penyaluran bantuan PKH tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018.¹³ Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih fokus pada tinjauan hukum Islam pada penyaluran PKH, sementara penelitian peneliti lebih difokuskan pada pendistribusiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang membawa peneliti secara langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan guna memperoleh informasi yang diperlukan.¹⁴ Adapun pendekatan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau

¹³ Fitriyana Nurmila Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 26

menggambarkan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat tentang distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif distribusi Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilaksanakan mulai dari tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah berlokasi di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi penelitian di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena masyarakat di RW 09 sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, buruh bangunan, pedagang, dan usaha kecil, serta terdapat masyarakat yang menerima bantuan sosial PKH.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek informasi atau responden yang bertindak sebagai objek penelitian, adalah pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian

yang sedang dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah teknik *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel sama dengan populasi.¹⁵

Penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dengan menggunakan seluruh populasi menjadi sampel, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Alasan menggunakan teknik *total sampling* adalah karena jumlah populasi kurang dari 100, oleh karena itu seluruh populasi dijadikan sampel. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, 1 orang pendamping PKH di RW 09 dan 17 orang peserta PKH. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1.¹⁶

Data informan penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Deden	Pendamping PKH
2.	Yusnita Wati	Peserta PKH
3.	Suhaibatul Islamiah	Peserta PKH

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020), h. 85.

¹⁶ Sumber: Pendamping PKH RW 09

4.	Weni Narti	Peserta PKH
5.	Sri Menanti	Peserta PKH
6.	Putri Herlina	Peserta PKH
7.	Ita Hartati	Peserta PKH
8.	Alfi Susanti	Peserta PKH
9.	Nelyus	Peserta PKH
10.	Suliyati	Peserta PKH
11.	Herwijasanti	Peserta PKH
12.	Yusmita Ayani	Peserta PKH
13.	Misli	Peserta PKH
14.	Marham	Peserta PKH
15.	Marna Dewi	Peserta PKH
16.	Eliharyanti	Peserta PKH
17.	Rumini	Peserta PKH
18.	Suryani	Peserta PKH

Sumber: Pendamping PKH RW 09

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, yakni berupa hasil wawancara langsung terhadap informan yang

telah ditetapkan peneliti, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak-pihak yang terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian.¹⁷ Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan, laporan dari penelitian terdahulu (laporan penelitian ilmiah atau jurnal), buku-buku, serta catatan berupa arsip-arsip mengenai profil Kelurahan Kandang Mas yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁸ Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi. Yang mana observasi dalam

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), h. 132.

¹⁸ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 104

penelitian ini bertujuan untuk pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan untuk mendapatkan data awal atau survei lokasi. Dimulai dengan peneliti mendatangi lokasi dan mengamati secara langsung, mengumpulkan fakta terkait objek penelitian, kemudian mencatat hasil pengamatan dan didokumentasikan sebagai hasil observasi.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui percakapan atau tanya jawab dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti.¹⁹ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan tersebut. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada orang yang terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, yakni

¹⁹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h.106

pendamping PKH dan peserta yang menerima bantuan PKH.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang apa yang akan diteliti yang dapat diperoleh untuk menambah pemahaman atau informasi penelitian.²⁰ Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membantu kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya foto-foto observasi yang peneliti lakukan, foto pada saat peneliti melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis model Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 218

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam tahap ini merupakan tahap mengumpulkan data penelitian mulai observasi sampai selesai. Reduksi data merupakan data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak. Kata mereduksi data artinya data ini di rangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada bagian-bagian yang penting, dicari tema dan polanya.²² Dalam tahap ini akan di dapat catatan-catatan lapangan. Dimana dalam tahap ini penulis akan melakukan penafsiran mengenai data yang didapat dari lapangan. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data maksudnya, menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Pada tahap ini data yang telah diperoleh di analisis dan di susun secara sistematis agar data yang telah dikumpulkan akan bisa menjawab dari masalah yang diteliti. Penyajian

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h.247

data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan mampu memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman terhadap apa yang sudah diamati.

c. *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Setelah data sebelumnya disajikan, maka langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan artinya kita menganalisis data yang telah diperoleh dari teknik analisis data sebelumnya. Menarik kesimpulan yaitu kita menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh mengenai fakta sebenarnya yang akhirnya menjadi jawaban dari rumusan masalah. Penarikan kesimpulan adalah metode terakhir dalam pengolahan dan analisis data.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap penelitian yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, berisikan tentang kajian teori, berisi pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan yang menjelaskan mengenai pengertian distribusi dalam Islam, tujuan distribusi Islam, prinsip distribusi Islam, mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dan Program Keluarga Harapan.

Bab III, berisi gambaran umum mengenai objek penelitian. Berisi gambaran umum mengenai wilayah penelitian. Berisi riwayat RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, visi misi dan tujuan RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan keadaan sosial penduduk.

Bab IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Menjelaskan analisis pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH), kendala yang dihadapi selama pendistribusian PKH dan pendistribusian dana Program

Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif distribusi Islam.

Bab V, berisi penutup, yang diberikan dengan adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi pemaparan berdasarkan hasil data yang diperoleh dan dari analisis yang dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai suatu bahan pemikiran dari peneliti dengan harapan bisa bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Distribusi Islam

1. Pengertian Distribusi dalam Islam

Menurut teori ekonomi Islam, secara bahasa bahwa distribusi berasal dari kata *dulah* berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang harus diputar (didistribusikan). Dan menurut istilah, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.²³

Terdapat adanya perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam dalam memaknai arti distribusi. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Distribusi juga sering juga

²³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System), cet. I*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 45

diartikan sinonim dengan pemasaran (*marketing*), dan terkadang dinamakan sebagai *functional distribution*.²⁴

Berbeda dengan itu, distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum (*public proverty*) dan kepemilikan pribadi (*privat proverty*), dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah, dan wasiat. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Islam tidak memperbolehkan distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman yang termasuk riba, hasil pencurian, khamar, bangkai, babi, dan sebagainya.²⁵

Menurut Afzalur Rahman, dalam buku Idri yang berjudul *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 128

²⁵ Idri, *Hadis...*, h. 129-130

dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat, maupun negara.²⁶

Menurut Muhammad Anas Zarqa, dalam Jurnal Al-Amwal Naerul Edwin Kiky Aprianto yang berjudul Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam mengemukakan bahwa distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi yaitu tukar-menukar (*Exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and sthical values*).²⁷

Menurut Rasulullah, distribusi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi tersebut mempunyai perbedaan; yang pertama bersifat *profit taking* (untuk mendapat

²⁶ Idri, *Hadis...*, h. 130

²⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "*Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*", Jurnal Al-Amwal, Nomor 2, Tahun 2016, Volume 8, h. 443

keuntungan) dan yang kedua *non-profit taking* (tidak untuk mendapat keuntungan). Dalam arti, distribusi jenis pertama dimaksudkan sebagai dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dan orang yang mendistribusikan mendapat laba (hasil) dari penjualan barang yang didistribusikan. Adapun distribusi jenis kedua, orang menyalurkan hartanya tidak mendapat pembayaran atau keuntungan (*profit*) langsung, tetapi di hari kemudian atau di akhirat. Kedua jenis distribusi tersebut, sama-sama dianjurkan oleh Rasulullah. Untuk distribusi yang pertama, misalnya, Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan barang (*ihthikar*) biasanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika barang sudah sedikit atau langka sehingga harganya mahal. Penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezaliman dan karenanya berdosa.²⁸

Jenis distribusi kedua dapat berupa zakat, nafkah, shadaqah, wasiat, hibah dan sebagainya. Rasulullah sangat menganjurkan agar distribusi kategori ini dilakukan oleh tiap muslim yang mampu. Dalam sebuah hartanya sebelum datang suatu masa

²⁸ Idri, *Hadis...*, h. 132-133

ketika tidak ada orang yang mau menerimanya.

Sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ مَآنٌ
يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ
بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا

“Dari Ma’bad ibn Khalid, katanya: Aku mendengar Haritsah ibn Wahab berkata, katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Bersedekahlah, karena (suatu saat akan datang masa) di mana seseorang berjalan untuk memberikan sedekahnya, tetapi orang yang akan diberinya (menolak) seraya berkata, ‘Seandainya kamu membawanya kemaren, niscaya aku menerimanya, tetapi kalau saat ini aku tidak membutuhkannya’. Maka tidak ada orang yang mau menerima sedekah itu.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim, lafal Hadis tersebut riwayat al-Bukhari)²⁹

Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan dibidang ekonomi. Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 133-134

jaminan sosial yang diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebagaimana firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”* (Q.S. 51/adz-Dzadriyat: 19)³⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan. Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerima itu.³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 416

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.130

Jadi, menurut pandangan Islam distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan, di mana agar sirkulasi kekayaan tersebut dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan secara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik.

2. Dasar Hukum Distribusi dalam Islam

Adapun dasar hukum distribusi terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah:

- a. Distribusi Harta terdapat dalam Q.S. Al-Hasyr (59):6

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ
خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦

Artinya: *“Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja*

yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”³²

- b. Prioritas Pendistribusian Harta, Q.S. Al-Hasyr (59):7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ السَّيِّئِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*”.³³

³² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, ..., h. 436

³³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, ..., h. 436

c. Q.S. Ali-Imron ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
١٣٤

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.³⁴

d. Q.S. Al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.³⁵

Berdasarkan dalil Alquran di atas, maka dapat dipahami bahwa distribusi merupakan suatu permasalahan penting dan juga merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam.

³⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, ..., h. 53

³⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, ..., h. 3

3. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam

Teori ekonomi mikro Islam, menyatakan bahwa distribusi menempati posisi penting dikarenakan pada pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan politik. Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat penting dalam mewujudkan tercapainya pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak diperhatikannya keuntungan yang diperoleh dari produksi. Agar distribusi memberikan arti yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:³⁶

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan *riil*. Keadilan

³⁶ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 150-154

distribusi dapat tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya *had al-kifayah*. Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.

Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas (*laissez faire*) sebagaimana yang dianut oleh ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang prang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.³⁷

³⁷ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.150

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi Islam ialah mengandung maksud.³⁸

- 1) Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkann persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit.
- 2) Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
- 3) Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (*ihthikar*) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat.

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin

³⁸ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.151

dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah, Q.S. 49/al-Hujurat: 10 sebagai berikut:³⁹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”*

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah agar umat Islam senantiasa berpegang teguh

³⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, ..., h. 412

dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, sebagaimana firman-Nya, Q.S. 3/Ali Imran: 103 sebagai berikut:⁴⁰

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

Artinya: *“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka kamu menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang nereka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”*

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non-Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, ..., h. 50

membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.⁴¹

c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Syawqi Ahmad Dunya, zakat memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.⁴²

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu:

⁴¹ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.152-153

⁴² Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.153

(a) sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, (b) adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya, (c) kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja, (d) adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, (e) umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, (f) larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang (riya), (g) larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti, (h) distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (mustahiq zakat), (i) anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, (j) anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan (k) larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi dikalangan masyarakat.⁴³

⁴³ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.153

4. Tujuan Distribusi dalam Islam

Sistem distribusi dalam ekonomi Islam datang dengan merealisasikan tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat Islam (*maqashid Asy-syariah*). Berikut tujuan-tujuan distribusi dalam Islam dapat dikelompokkan kepada:⁴⁴

a. Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah disini ialah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan bisa dilihat dari adanya penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bisa bertambah kuat iman dan keislamannya. Pada sisi lain, begitu juga terhadap para *muzakki*, dengan menyerahkan sebagian hartanya karena Allah Ta'ala berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah.⁴⁵

⁴⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 140-141

⁴⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 140

b. Tujuan Pendidikan

Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang paling penting adalah sebagai berikut: ⁴⁶

- 1) *Akhlak al-karimah*, pendidikan terhadap akhlak terpuji, misalnya seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.
- 2) Mensucikan diri dari *akhlak al-mazmumah*, mensucikan diri dari akhlak yang tercela, seperti kikir, loba, dan mementingkan diri sendiri (egois).

c. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, serta mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga terealisasinya

⁴⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 140

keamanan dan ketenteraman masyarakat, karena dengan distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak pada adanya kelompok dan daerah miskin dan meningkatkan kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman.⁴⁷

d. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana diantaranya yaitu:⁴⁸

- 1) Pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak wajib maupun infak sunnah. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan.
- 2) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka.
- 3) Memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan

⁴⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 141

⁴⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 141

dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat.

- 4) Penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi.

5. Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan.⁴⁹ Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investai, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan disegelintir golongan, larangan kegiatan

⁴⁹ Nunung Nurlaela, “*Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 17 No. 2 2017, h. 178

monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba korupsi dan pemberian suap.⁵⁰

Mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non produktif, seperti pemberian hibah, hadiah, sedekah, zakat, wakaf dan warisan. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini antara lain:⁵¹

- a. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan
- b. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik
- c. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan
- d. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain

Untuk menciptakan kesejahteraan umat dan mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui zakat, wakaf, sedekah, infak, waris, serta hibah. Dengan demikian, terdapat

⁵⁰ Kuni Zakiyah, “*Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)*”, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2 No. 1 2017, h. 46

⁵¹ Kuni Zakiyah, “*Peran...*”, h. 47

instrumen yang mampu mewujudkan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam diantaranya adalah:

a. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah fiqh, zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵² Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.

b. Wakaf

Wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Secara konseptual wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi kaum dhuafa dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan seperti

⁵² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam "Hukum Zakat", (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 34

menyewakan bangunan pusat pembelanjaan. Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian harta baik secara tunai maupun tidak, dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf berkaitan dengan kemanfaatan harta bagi kepentingan umat.⁵³

c. Waris

Waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini tidak terlepas dari konsep Islam bahwa harta harus tersebar di masyarakat bukan terkumpul pada satu dua orang saja. Konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial *riil* dalam keluarga. Terlepas dari perbedaan penafsiran dalam ranah hukum, pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan mampu membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Membagikan harta waris

⁵³ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan...”, h. 84-85

kepada ahli waris yang berhak baik disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian, secara langsung telah menciptakan jaminan sosial dalam keluarga, agar diantara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan.⁵⁴

d. Infaq dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada *nishab*-nya, maka infak tidak memiliki *nishab*. Selain tidak ada ketentuan *nishab* dalam infak, ketentuan tentang delapan golongan (*tsamaniyah athnâf*) yang menerima zakat juga tidak berlaku di

⁵⁴ Nandang Ihwanudin, Annisa Eka Rahayu, “*Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”, Jurnal Ilmu-Ilmu Al-quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah. Vol. 5 No.1 2020, h. 141

dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada siapa pun.⁵⁵

Sedekah yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain baik orang pemberinya kaya atau pun tidak. Sedekah dalam konsepsi Islam mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik. Misalnya, bersedekah dengan harta, menolong orang, melakukan kebaikan, mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan, menunjukkan sesuatu bagi orang yang tidak mengerti, dan lain-lainnya. Apabila dicermati lebih jauh, keberadaan instrumen infak dan sedekah akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh. Bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyarakat, namun lebih mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera.⁵⁶

e. Hibah dan Hadiah

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*. Secara etimologi, hibah berarti pemberian.

⁵⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Islam. Vol. 14 No.2 2016, h. 83

⁵⁶ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan..., h. 84

Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu yang telah dilakukannya. Biasanya hadiah merupakan pemberian terhadap prestasi dan keberhasilan seseorang. Dalam kenyataannya, hadiah seringkali diberikan sebagai balasan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.⁵⁷

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk

⁵⁷ Enizar, "*Hadiah kepada Pejabat Tinjauan Hadis Rasulullah SAW*", Jurnal Tapis, Vol . 12 No 1, 2012, h. 4

memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka.⁵⁸

Program Keluarga Harapan (PKH) yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.⁵⁹

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1. Yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh

⁵⁸ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan sosial, Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 7

⁵⁹ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 18

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁶⁰

Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.⁶¹

Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang yang disalurkan kepada KPM, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak

⁶⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, h. 3

⁶¹ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 18-19

mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. Pendamping Sosial PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis pengolahan data di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.⁶²

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:⁶³

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

⁶² Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 19-20

⁶³ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 22

- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemanfaatan bantuan sosial yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan PKH.

3. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:⁶⁴

a. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Ibu hamil/nifas/menyusui.

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

⁶⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 22-23

2) Anak Usia Dini

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0 – 6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1) Lanjut Usia

Seseorang berusia lanjut mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

2) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

a. Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) berhak mendapatkan:⁶⁵

- 1) Bantuan Sosial PKH;
- 2) Pendampingan sosial PKH;
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- 4) Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

⁶⁵ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 24

b. Kewajiban KPM PKH

Kewajiban KPM Program Keluarga Harapan (PKH) pada kondisi Normal terdiri dari:⁶⁶

- 1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0 – 6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan;
- 2) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif;
- 3) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali;
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan;

⁶⁶ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 24-25

- 5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
- 6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

Kewajiban KPM Program Keluarga Harapan (PKH) pada kondisi pandemi covid-19 terdiri dari:⁶⁷

- 1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0 – 6 tahun) yang belum bersekolah wajib melaksanakan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan;
- 2) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan penerapan protokol kesehatan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan gugus tugas covid-19;
- 3) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas

⁶⁷ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 26

berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali dengan menerapkan protokol kesehatan;

- 4) KPM wajib menerima dan menerapkan materi-materi yang ada dalam modul P2K2 khususnya modul kesehatan dan penerapan protokol kesehatan.

5. Mekanisme Penyaluran PKH

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:⁶⁸

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
 - 1) Rekening penerima bantuan sosial dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur.
 - 2) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.

⁶⁸ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 29-30

b. Sosialisasi dan edukasi

Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM

Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

d. Proses penyaluran bantuan sosial KPM

Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur.

e. Penarikan dana bantuan sosial PKH

Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang

disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen bank dan e-warong.

f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

Merupakan kegiatan pencocokkan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bantuan sosial kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Riwayat RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

RW 09 Kelurahan Kandang Mas terletak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. RW 09 Kelurahan Kandang Mas merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kampung Melayu. Yang mana masyarakat pada mulanya yang banyak menempati wilayah ini beraneka ragam, ada yang asli Bengkulu maupun pendatang dari luar kota yang sudah lama menetap di Bengkulu. Jumlah Kartu Keluarga (KK) saat ini di RW 09 adalah 1.376 KK, dan akan terus bertambah karena sekarang masih proses pemekaran RT. Adapun yang menjabat sebagai ketua RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu saat ini ialah Bapak John Kanidi yang sudah menjabat selama tiga tahun sebagai ketua RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dibantu oleh wakil ketua RW dan bendahara dan juga warga yang ada di lingkungan RW 09.

Situasi dan kondisi di lingkungan RW 09 ini sudah mengalami kemajuan. Beberapa kemajuan yang ada di

RW 09 ini dapat dilihat dengan jalanan yang sudah bagus sehingga lebih mudah untuk transportasi umum, di setiap rumah diberikan nomor agar lebih mudah mencari alamat, saat mencari alamat di sini tidak akan sulit lagi karena sudah diberikan palang di depan gang, lapangan yang ada di RW 09 biasanya untuk mengadakan kegiatan, bisa digunakan untuk bermain dan juga perlombaan. Karena sering sekali mengadakan perlombaan untuk menjaga keharmonisan di lingkungan rukun tetangga. Perlombaan yang sering dilaksanakan seperti balap karung, voli, lari kelereng, bola kaki anak-anak dan tarik tambang.

RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu terdiri dari 9 RT, yaitu:
Tabel 3.1.⁶⁹

Data Jumlah RT di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

No.	Nama RT
1.	RT 17
2.	RT 41
3.	RT 42
4.	RT 47
5.	RT 48

⁶⁹ Sumber: Data Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

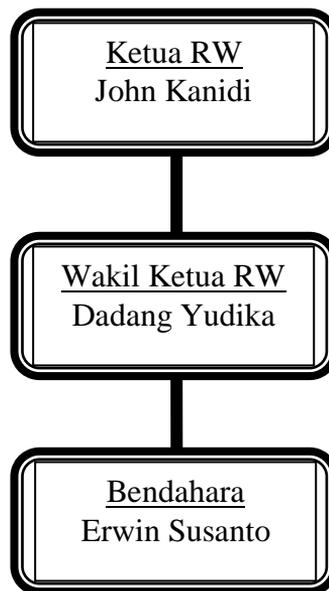
6.	RT 50
7.	RT 51
8.	RT 52
9.	RT 54

*Sumber Data: Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu*

Adapun struktur dalam kepengurusan di RW 09 adalah sebagai berikut:⁷⁰

Gambar 3.1.

Struktur Kepengurusan RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu



*Sumber Data: Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu*

⁷⁰ Sumber: Data Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

B. Visi, Misi dan Tujuan RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

1. Visi

Terwujudnya lingkungan masyarakat yang bersih, sehat, beriman, berbudaya dan berwawasan lingkungan.

2. Misi

Menciptakan lingkungan yang aman, rukun, nyaman dan bersih. Serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

3. Tujuan

Mampu mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, rindang, asri dan bersih.

C. Keadaan Sosial Penduduk

Masyarakat di RW 09 Kelurahan Kandang Mas terletak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu memiliki kategori kurang mampu, menengah, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor yang berbeda-beda. Sebagian besar di sektor petani/pekebun, buruh bangunan, pedagang, usaha kecil, PNS, karyawan swasta, dan wiraswasta. Kondisi ekonomi masyarakat di RW 09 Kelurahan Kandang Mas terletak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu terlihat jelas perbedaannya.

Kehidupan beragama masyarakat di RW 09 Kelurahan Kandang Mas terletak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu berjalan dengan baik dan harmonis, meskipun adanya perbedaan agama. Walaupun terdapat masyarakat yang beragama selain Islam, namun demikian, semuanya berjalan dengan damai dan baik-baik saja tanpa ada konflik antara pemeluk agama lainnya. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2⁷¹

Data Persentase Agama di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	95 %
2.	Kristen	4 %
3.	Hindu	1 %
4.	Budha	-

*Sumber Data: Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu*

⁷¹ Sumber: Data Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam hal ini, penerimaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat miskin juga terjadi di Kota Bengkulu yaitu di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah dilaksanakan sejak tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga

Harapan Pasal 37 tentang penyaluran Bantuan Sosial PKH yaitu:⁷²

- a. Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
- b. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- c. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping PKH pada kegiatan pertemuan awal:

- a. Menginformasikan tujuan PKH
- b. Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank
- c. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program.
- d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH

⁷² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, h. 21

- e. Menjelaskan hak dan kewajiban PKH
- f. Penjelasan tentang jadwal penyaluran PKH
- g. Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah berjalan, yang di tandai dengan adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH.

Tabel 4.1.⁷³

Data Peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

No.	Nama	Komponen
1.	Sri Menanti	Komponen Kesehatan
2.	Alfi Susanti	Komponen Kesehatan
3.	Marham	Komponen Kesejahteraan Sosial
4.	Yusnita Wati	Komponen Pendidikan
5.	Putri Herlina	Komponen Pendidikan
6.	Ita Hartati	Komponen Pendidikan
7.	Rumini	Komponen Pendidikan
8.	Nelyus	Komponen Pendidikan
9.	Suliyati	Komponen Pendidikan

⁷³ Sumber: Pendamping PKH RW 09

10.	Herwijasanti	Komponen Pendidikan
11.	Eli Haryanti	Komponen Pendidikan
12.	Misli	Komponen Pendidikan
13.	Suryani	Komponen Pendidikan
14.	Marna Dewi	Komponen Pendidikan
15.	Yusmita Ayani	Komponen Pendidikan
16.	Suhaibatul Islamiah	Komponen Pendidikan
17.	Weni Narti	Komponen Pendidikan

Sumber: Pendamping PKH RW 09

Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil. Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang terdiri dari beberapa informan.

Untuk mengetahui tentang Program Keluarga Harapan, sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Bapak Deden, selaku pendamping PKH, mengatakan:

“Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat unuk membantu

para peserta PKH untuk menyekolahkan anak dan juga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita. Serta untuk bantuan untuk komponen lanjut usia juga. Tujuan PKH ini adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan antar generasi.”⁷⁴

Selain itu, peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Berikut hasil wawancara:

“Kalau untuk yang pertama itu, untuk pendataan, kami sebagai yang ditugaskan menjadi pendamping PKH ini, itu hanya menjalankan tugas memvalidasi sebenarnya ya dek, dan juga kami mendampingi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimana nama-namanya telah kami terima dari pusat kemensos, kemudian dinas sosial, lalu selanjutnya kami sebagai pendamping PKH kemudian mencari peserta PKH tersebut di wilayah yang kami ditugaskan. Pendamping akan melakukan validasi data para calon KPM dan dilakukan lah pengumpulan syarat juga seperti KTP, KK dll, juga dilakukan verifikasi komitmen yang disebut pertemuan awal, dimana untuk mengumpulkan seluruh calon untuk klarifikasi data dan penandatanganan dari calon KPM yang akan menjadi KPM. Jadi, pendamping disini hanya memvalidasi data saja, tidak menetapkan KPM PKH,

⁷⁴ Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2022

karena itu riil datanya dari kementerian sana.”⁷⁵

Tugas pendamping PKH yaitu dimana saat awal menjadi pendamping PKH melaksanakan kegiatan yang meliputi menyelenggarakan pertemuan awal, serta sosialisasi program kepada KPM dan masyarakat umum. Adapun tugas lainnya yaitu mengadakan pertemuan bulanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, peneliti juga menanyakan kategori orang yang berhak menerima bantuan PKH. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Deden:

“Kemudian sasaran utama dari program PKH ini yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM), yang terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yaitu kategori masyarakat miskin, supaya dapat meningkatkan pendidikan dan kesehatannya. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat. Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta yang telah terdata kemudian cek kelapangan untuk melihat keadaan peserta yang sebenarnya. Karena ya data PKH ini kita terima dari pusat langsung, jadi kita tidak terlibat

⁷⁵ Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2022

langsung. Setelah mendapatkan data, barulah baru kita ke tahap selanjutnya yaitu pertemuan awal.”⁷⁶

Dalam program PKH pendamping melakukan strategi dalam pertemuan awal. Sebelum pertemuan awal dilaksanakan para pendamping membagikan undangan. Masyarakat yang mendapat undangan adalah masyarakat yang terdata kategori miskin. Selanjutnya menentukan letak dan waktu tempat kumpulnya. Tempat yang digunakan biasanya tempat umum dimana tempat yang sesuai untuk mengenalkan program PKH.

“Kami juga ada pertemuan di setiap bulannya. Itu kami setuju di setiap tanggal 13 disepakatkan, kami berkumpul untuk mengadakan pertemuan bulanan. Dan tentunya ini juga bekerja sama dengan ketua kelompok agar mengkoordinir para peserta PKH. Di dalam pertemuan nantinya, guna untuk menjelaskan kembali tentang program PKH ini, takutnya ada yang lupa atau mungkin belum sepenuhnya paham ya hehe. Serta juga menanyakan sambil berdiskusi ngobrol gitulah, apakah ada yang menambah komponen yang ada di keluarga dan mengeluarkan apabila komponen yang ada tersebut tidak memenuhi sebagai syarat penerima. Jika yang tidak memenuhi

⁷⁶ Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2022

persyaratan maka bantuan PKH nya yaaa harus dihilangkan, contohnya misal salah satu keluarga mendapatkan bantuan PKH komponen pendidikan, mempunyai empat orang anak yang masih sekolah, apabila ada satu anaknya yang berhenti sekolah maka bantuan yang satu itu dicabut, yang menerima bantuan yang tiga aja lagi, begitu.”⁷⁷

“Untuk komitmen fasilitas pendidikan anak yang sedang sekolah absensi kehadiran tidak boleh kurang dari 85%, apabila absennya kurang dari 85% maka diproses pencairan akan ada pengurangan sebesar 10% dari nilai yang diterima dan apabila kejadian ini terulang selama tiga bulan maka komponen yang diterima keluarga akan dicabut. Untuk ibu hamil dan balita harus memeriksa kandungannya minimal 4 kali sebelum waktu kelahiran, dan begitu pula balita harus memeriksa kesehatan di posyandu terdekat atau puskesmas.”⁷⁸

Selain itu, peneliti juga menanyakan tentang pencairan dana PKH. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pencairannya itu melalui BRI, dan jadwal pencairan dari pusatnya langsung mba, engga nentu tanggalnya berapa pokoknya dapetnya tiga bulan sekali aja gitu.”⁷⁹

2022 ⁷⁷ Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret

2022 ⁷⁸ Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret

2022 ⁷⁹ Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret

Adapun besaran nominal berdasarkan komponen masing-masing KPM-PKH, yaitu:

Tabel 4.2.⁸⁰

Besar Bantuan Komponen PKH

No.	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp) / Tahun
1.	Ibu hamil/menyusui	Rp3.000.000/tahun
2.	Anak usia dini	Rp3.000.000/tahun
3.	Anak SD/ sederajat	Rp900.000/tahun
4.	Anak SMP/ sederajat	Rp1.500.000/tahun
5.	Anak SMA/ sederajat	Rp2.000.000/tahun
6.	Disabilitas berat	Rp2.400.000/tahun
7.	Lanjut usia	Rp2.400.000/tahun

Sumber: Pendamping PKH RW 09

Selain itu, peneliti juga menanyakan bagaimana jika ada KPM yang tidak memenuhi kewajiban. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi kewajiban, kami tidak terlalu memberatkan mba, dan kami juga tidak terlalu mengawasi secara detail, kami juga minta

⁸⁰ Sumber: Pendamping PKH RW 09

bantuan ketua kelompok untuk mengawasi peserta penerima PKH. Karena sudah terdapat buku kegiatan.”⁸¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH menandakan bahwa bantuan PKH memiliki tujuan dan kriteria bagi penerima PKH, maka bantuan PKH tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta PKH untuk mensejahterakan keluarganya. Pendamping PKH berusaha untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada peserta penerima PKH, selalu berusaha mempererat silaturahmi dan sabar untuk menghadapi berbagai keluhan-keluhan peserta PKH. Hal ini sejalan seperti yang dikatakan oleh Marna Dewi selaku KPM PKH yang mengatakan bahwa:

“Koordinasi pendamping PKH dengan kami para penerima PKH sudah lumayan baik, dengan kami juga rutin mengadakan pertemuan dalam bentuk arisan. Hal ini bertujuan agar komunikasi kami dengan pelaksana PKH tetap terjalin dengan baik.”⁸²

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta pemahaman

⁸¹ Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2022

⁸² Marna Dewi, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 19 Maret 2022

para KPM terhadap PKH, peneliti melakukan wawancara kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil wawancara dengan Yustina Wati, selaku Ketua Kelompok PKH di RW 09, mengatakan bahwa:

“Saya diminta atau istilahnya ditunjuk untuk menjadi koordinator. Yaa kata lainnya sebagai perantara agar lebih mudah membantu pendamping PKH juga. Seperti hal membantu mengarahkan, mengumpulkan anggota, lalu jika ada data kurang bisa disampaikan, seperti misalkan ada KTP yang jika ada bermasalah. Kemudian setiap satu bulan sekali itu kami mengadakan pertemuan, di setiap tanggal 13. Di pertemuan itu nanti, selain membahas jika ada masalah lain, juga ada pelajaran/pelatihan untuk ibu-ibu cara agar lebih dekat kepada anak-anak serta balita, dilakukan bersama pendamping PKH.”⁸³

Wawancara kepada Ita Hartati, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, mengatakan:

“Program Keluarga Harapan (PKH) ini diberikan untuk warga yang kurang mampu, yang miskin, contohnya seperti wak sendiri. Dengan adanya bantuan PKH dari pemerintah ini, bisa dapat membantu ekonomi. Untuk

⁸³ Yustina Wati, Ketua Kelompok PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret 2022

memenuhi kebutuhan yang banyak sekarang.”⁸⁴

“Kalau untuk bagaimana pendataannya kurang tau juga, tiba-tiba sudah ada saja pemberitahuan bahwa ternyata menerima bantuan program PKH dan disuruh datang dan membawa syarat-syarat yaitu seperti fotocopy KTP, KK, Rekening Listrik, Rapor Anak”⁸⁵

Hasil wawancara dengan Alfi Susanti, mengungkapkan bahwa:

“Program keluarga harapan ini diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya, seperti yang tidak mampu, miskin, yang memiliki balita misalnya, terus juga yang mempunyai anak kecil yang masih sekolah, dan ada juga bantuan untuk orang tua yg sudah lansia, menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kami, apalagi program ini digunakan kepada anak-anak atau keperluan sekolah anak, kami dengan mudah menyekolahkan anak”⁸⁶

“Sedangkan untuk jadwal pencairan, jadwalnya dari pusatnya langsung iga, tidak nentu tanggalnya berapa pokoknya dapatnya tiga bulan sekali.”⁸⁷

2022 ⁸⁴ Ita Hartati, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret

2022 ⁸⁵ Ita Hartati, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret

2022 ⁸⁶ Alfi Susanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret

2022 ⁸⁷ Alfi Susanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret

Peneliti juga menanyakan kepada peserta PKH mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut hasil wawancara dengan Yusmita Ayani, mengatakan:

“Kami dikumpulkan kemudian diberi arahan juga tentang bantuan PKH ini, sehingga hasilnya ya kami jadi mengerti lah kalau program ini tuh ditujukan untuk ibu hamil, dan anak-anak yang masih sekolah, tapi diberinya lewat ibu rumah tangga. Terus juga bantuan PKH ini bukan untuk diberikan sekedar cuma-cuma saja dek, tapi ada kewajiban yang mesti kami lakukan juga sebagai penerima PKH, contohnya seperti bagi yang ibu hamil rutin ke posyandu, imunisasi balita, terus sama sekolahin anak. Kalau misal ada diantara anggota PKH yang tidak melaksanakan kewajiban, itu harus siap kami terima kalau dikenakan teguran atau sanksi .”⁸⁸

Hasil wawancara kepada Sri Menanti, mengatakan bahwa:

“Ga masalah bagi saya untuk melakukan kewajiban sebagai peserta PKH mengikuti kegiatan di posyandu, tapi kegiatan di posyandu itu membosankan dan sangat menyita waktu. Bagaimana tidak, jika seharusnya saya bisa melakukan pekerjaan

⁸⁸ Yusmita Ayani, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 17 Maret 2022

lain namun saya harus menunggu lama di pos dan anak saya terkadang rewel mba.”⁸⁹

Wawancara dengan Putri Herlina, mengatakan:

“Selama saya mendapatkan bantuan PKH, setiap pertemuan bulanan saya selalu hadir, kalau saya tidak hadir nanti takutnya uang PKH tidak keluar di bulan selanjutnya.”⁹⁰

“Untuk saya pribadi belum pernah mendapatkan sanksi berupa apapun, karena saya selalu melakukan peraturan PKH, yang saya ketahui sanksi bagi yang melanggar peraturan PKH untuk awalan masih berupa teguran, jika bulan yang akan datang 3 kali tidak hadir dalam pertemuan kelompok maka akan diberikan sanksi.”⁹¹

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang besaran bantuan yang diterima. Hasil wawancara dengan Misli, mengatakan:

“Mengenai jumlah bantuannya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kami hanya mengikuti saja sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Dengan adanya program ini juga, ayuk sendiri sebagai penerima bantuan sangat merasakan dampak baiknya.”⁹²

⁸⁹ Sri Menanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2022

⁹⁰ Putri Herlina, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2022

⁹¹ Putri Herlina, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2022

⁹² Misli, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 3 Maret 2022

Wawancara dengan Weni Narti, mengatakan:

“Kalau untuk prosedur detail saya kurang paham, karena pendamping juga ga menjelaskan dengan detail tentang prosedur program PKH ini, saya hanya mengikuti instruksi dari ketua dan pendamping saja. Kalau kata ketua pencairan ya saya ke Bank BRI atau melalui BRILink, kalau kata ketua perkumpulan kelompok saya datang. Cuma prosedur seperti itu yang saya tau.”⁹³

“Kalau untuk besaran jumlah bantuan yang diterima oleh peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anak SD/MI atau SMP/MTs, jumlah balita, serta ada tidaknya ibu hamil dalam rumah tangga miskin.”⁹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana PKH dilakukan secara transaksi penarikan yang dapat dilakukan di layanan seperti ATM, Kantor Bank, dan Agen bank. Salah satu yang memperlancar pendistribusian PKH di RW 09 adalah masyarakat penerima PKH mau mendengarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh pendamping.

Peneliti juga menanyakan kepada para KPM terkait apakah masyarakat merasa terbantu dengan

⁹³ Weni Narti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2022

⁹⁴ Weni Narti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2022

adanya PKH. Berikut hasil wawancara dengan Marham, mengatakan:

“Sangat merasa bersyukur bisa mendapat bantuan PKH ini. Dapat bantuan kategori lansia. Bisa menambah biaya hidup, meringankan ekonomi yang susah. Kemudian dipakai untuk kebutuhan sehari-harilah, beli beras, sayuran, dan yang penting-penting lain untuk hidup. Jadi bersyukur dan merasa terbantu. Apalagi sudah tua begini hehe.”⁹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Marham yang mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan PKH sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi.

Senada dengan yang disampaikan oleh Suhaibatul Islamiah sebagai berikut:

“Jelas memberikan keuntungan. Sekolah kan butuh perlengkapan juga. Dengan adanya bantuan PKH ini sehingga kebutuhan sekolah anak saya seperti baju sekolah, sepatu, buku tulis bisa terpenuhi, karena itu jadi saya sangat terbantu dengan adanya program ini. Jadi saya

⁹⁵ Marham, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret 2022

sangat bersyukur pemerintah mengadakan program PKH ini.”⁹⁶

Kemudian, wawancara dengan Nelyus, mengatakan bahwa:

“Saya rasa belum sepenuhnya terbantu, meskipun agak terbantulah sedikit dengan adanya program ini, setidaknya beban kami yang tergolong miskin ini sedikit berkurang.”⁹⁷

“Hanya pendidikan dan kesehatan anak sedikit terbantu. Tapi untuk mengurangi tingkat kemiskinan belum maksimal.”⁹⁸

Wawancara dengan Herwijasanti, mengatakan:

“Bantuan dana PKH yang diberikan kepada masyarakat sangat bermanfaat. Masyarakat yang mendapatkan bantuan dana dari PKH sudah diberitahukan agar dana tersebut harus digunakan untuk keperluan atau kebutuhan sekolah anak-anak yang utama bagi yang mempunyai anak usia sekolah. Masyarakat dapat dibantu dalam pembiayaan pendidikan anaknya. Dengan adanya program ini anak bersekolah jadi meningkat.”⁹⁹

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang apakah pelaksanaan PKH di RW 09 sudah tepat

⁹⁶ Suhaibatul Islamiah, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 19 Maret 2022

⁹⁷ Nelyus, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret 2022

⁹⁸ Nelyus, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret 2022

⁹⁹ Herwijasanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 19 Maret 2022

sasaran. Hasil wawancara dengan Suryani, mengatakan:

“Yang menerima bantuan PKH di RW 09 ini memang sudah sesuai dengan kategori, termasuk miskin semua. Tapi belum rata, karena masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya dibantu juga tetapi tidak dapat. Contohnya seperti yang saya kenal, seharusnya Ibu Midarti itu misalnya perlu dapat juga bantuan, alasannya nya termasuk miskin, terus dia itu juga punya balita dek. Sebenarnya setiap program apapun pada tahap pelaksanaanya pasti ada kendala yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu pengoptimalan lagi baik dari sisi pelaksana maupun dana bantuannya.”¹⁰⁰

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Rumini, yang mengatakan bahwa:

“Masih kurang merata kalau menurut saya sih mba. Ya seharusnya ada yang berhak dapat juga, tapi sayangnya belum terdata, jadinya tidak dapat mbak. Seperti tetangga saya itu, Ibu Hutnida, seharusnya layak, karena kalau kita lihat, rumahnya masih papan, dan juga maaf, anaknya cacat mba. Tapi hal ini kalau saya tidak salah info, sudah diberitahukan kepada Ketua RT setempat untuk pengajuan

¹⁰⁰ Suryani, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 23 Maret 2022

penerimaan bantuan. Sekarang masih menunggu hasil mba.”¹⁰¹

Wawancara kepada Yusnita Wati, mengatakan bahwa:

“Yaaa masih ada dek yang masyarakat sini yang miskin, tapi belum dapat bantuan PKH. Jadi terkadang ada yang agak gimana gitu rasanya ya, bisa dibilang cemburu, karena dia merasa dia juga harusnya dapat bantuan, tapi kok malah belum dapat-dapat. Sebenarnya kalau dilihat keadaan, ya seharusnya juga ikut termasuk kategori. Tapi ya gimana lagi, itu pihak sana lagi yang mengurusnya. Tapi sudah dibilang sama RT, kemungkinan lagi diusahakan semoga nanti bisa dapat dek.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara kepada Eli Haryanti, mengatakan bahwa:

“Menurut saya sih ada beberapa yang layak mendapatkan PKH. Contohnya Ibu Gustinawati. Ayuk Gustina itu dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, termasuk miskin juga.”¹⁰³

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian dana

¹⁰¹ Rumini, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 17 Maret 2022

¹⁰² Yustina Wati, Ketua Kelompok PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret 2022

¹⁰³ Eli Haryanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 23 Maret 2022

Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah berjalan, ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima bantuan PKH. Pendistribusian dana PKH dilaksanakan dengan pendamping PKH menerima data calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dari Dinas Sosial Bengkulu, selanjutnya pendamping PKH melakukan sosialisasi, memvalidasi, dan pertemuan kelompok. Untuk penyaluran dana, yaitu dengan pembukaan rekening penerima PKH oleh BRI. Pengambilan dana dilakukan di BRI dengan Rekening atau ATM masing-masing penerima bantuan PKH dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya apapun.

2. Kendala dalam Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Pendistribusian Dana PKH di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu juga tidak lepas dari adanya kendala. Terkait dengan kendala yang dialami selama pendistribusian PKH. Berdasarkan hasil wawancara

kepada Bapak Deden, selaku pendamping PKH, adalah sebagai berikut:

“Kendala atau hambatan di lapangan yaitu saya menemukan ada yang KTP dan KK nya tidak sinkron, itu biasanya kebanyakan disebabkan terlalu banyak diganti atau perubahan, saya juga ga begitu yakin. Misal contoh, di KTP, spasi antar namanya itu tidak sama, itu bisa jadi masalah juga.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH di atas, kendala di lapangan dalam pendistribusian yaitu dalam hal pengecekan data yang diperlukan, terdapat KTP dan KK yang tidak sinkron satu sama lain, hal ini dapat berdampak pada terlambatnya waktu pencairan dana nantinya bagi KPM tersebut.

B. Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam Perspektif Distribusi Islam

Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari segi pencapaian tujuan yang sebenarnya adalah bertujuan pada tujuan sosial dalam ekonomi Islam yaitu memenuhi kebutuhan kelompok

¹⁰⁴ Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2022

yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas, dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

Selanjutnya dilihat dari hal pendistribusian, ada prinsip-prinsip distribusi dalam Islam yaitu:

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan. Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum tercapainya keadilan dan pemerataan. Sebagaimana yang ditunjukkan dengan hasil wawancara, diketahui bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum tersalurkan secara adil dan belum rata. Ada yang memenuhi kriteria tetapi belum mendapat bantuan PKH, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan PKH dan belum tercapainya pemerataan.
2. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang, konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan

solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Dengan adanya pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan bagi mereka, hal ini menggambarkan adanya bentuk kepedulian antar sesama muslim, yang dibuktikan dengan bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi.

3. Prinsip Solidaritas Sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dengan pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang belum berjalan secara optimal, menyebabkan belum tercapainya rasa solidaritas, karena prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung elemen dasar, yaitu anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi

masyarakat. Dengan belum adil dan belum ratanya pendistribusian, mengakibatkan ada rasa kecemburuan sosial antar masyarakat, yang dimana hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan dalam bermasyarakat. Hal ini yang menyebabkan belum tercapainya prinsip solidaritas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yaitu dilaksanakan dengan pendamping PKH menerima data calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, selanjutnya pendamping PKH melakukan sosialisasi, memvalidasi, dan pertemuan kelompok. Untuk penyaluran dana, yaitu dengan pembukaan rekening penerima PKH oleh BRI.
2. Kendala yang terjadi terkait dengan pendistribusian dana PKH pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yaitu terdapat KTP dan KK KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang tidak sinkron satu sama lain.
3. Berdasarkan perspektif distribusi Islam, pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum sesuai dengan distribusi dalam Islam. Karena belum memenuhi dua prinsip dalam distribusi Islam, yaitu prinsip keadilan dan pemerataan, dan prinsip

solidaritas sosial. Namun telah sesuai dengan prinsip persaudaraan dan kasih sayang.

B. Saran

Ada beberapa saran dari peneliti yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak terkait:

1. Pemerintah hendaknya selalu melihat dan meninjau kondisi masyarakatnya secara langsung untuk memberikan bantuan yang tepat bagi warganya.
2. Bagi masyarakat, perlu diberdayakan lagi melalui pengetahuan keterampilan, agar mempunyai penghasilan lain, sehingga mampu memenuhi kebutuhan bagi keluarga. Dan juga masyarakat miskin hendaknya jangan salah kaprah, apabila tidak memenuhi kriteria penerima manfaat PKH, maka tidak bisa mendapat bantuan PKH.
3. Bagi pendamping, lebih diperhatikan lagi dengan lebih teliti, apakah usulan dari data yang didapat dari Kementerian Sosial mengenai calon KPM PKH sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, karena pada kenyataannya, sering dijumpai di lapangan bahwa ternyata ada yang tidak layak mendapat bantuan, dengan kata lain, tidak memenuhi kriteria penerima manfaat PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisanjaya, Syahputra. “Program keluarga harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Riset dan PKM*. Vol. 4 No.1 2017.
- Aliamsa. “*Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu*” Sulawesi Selatan: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah. 2021.
- Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia Cet. Ke-1*. Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Amwal*. Vol. 8 No. 2. 2016.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14 No.2 2016.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Basith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN Maliki Pres. 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta: PrenadaMedia Group 2005.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System), cet. I*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.

- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2006.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan sosial, Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Enizar, "Hadiah kepada Pejabat Tinjauan Hadis Rasulullah SAW", *Jurnal Tapis*, Vol . 12 No 1, 2012.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Handayani, Elvira. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara", *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 19 No. 03. 2018.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Ihwanudin, Nandang., Annisa Eka Rahayu. "Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*. Vol. 5 No.1 2020.
- Irmayanti, Ika. "*Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Miskin Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*" Makassar: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

- Nurlaela, Nunung. “Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 17 No. 2. 2017.
- Nurmila Sari, Fitriyana. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*” Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah. 2021.
- Paisah, Siti. “*Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal*” Medan: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Rapita, Meltesa. “*Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam.*” Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun et.al. dalam “*Hukum Zakat*”. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 1996.
- Sari, Susmita. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di*

Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.”
Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah. 2020.

Sari, Widya. “Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5 No. 2. 2014.

Zakiah, Kuni. “Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2 No. 1. 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Iga Atriani
NIM : 1811130138
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)	 Iga Atriani	 Dr. Desi Isharini, MA MP 197412022006042001

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama : Iga Atriani
NIM : 1811130138
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2021 M/1443 H

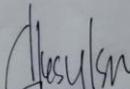
Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Desember 2021 M
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui


Eka Sri Wahvuni, S.E., M.M
NIP 197705092008012014

Penyeminar


Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0038/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. : 19741202200604200
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Khairiah elWardah, M.Ag
N I P. : 197808072005012008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a : Iga Atriani
Nim. : 1811130138
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : PENDISTRIBUSIAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF DISTRIBUSI ISLAM (STUDI PADA RW.09 KELURAHAN KANDANG MAS KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU).
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 Januari 2022
Plt. Dekan

Dr. Isnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH:

1. Berapa lama bapak/ibu sudah mendapat bantuan PKH?
2. Apakah anda paham mengenai Program Keluarga Harapan?
3. Apa kewajiban pendidikan bagi anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH?
4. Apa kewajiban kesehatan bagi anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH?
5. Apa kewajiban bagi komponen kesejahteraan sosial untuk penerima manfaat PKH?
6. Dalam bentuk apa bantuan PKH yang diterima oleh masyarakat?
7. Apakah besaran bantuan tunai yang diterima KPM PKH sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan program?
8. Bagaimana komunikasi antara pendamping PKH dengan KPM di RW 09 dalam pemberian sosialisasi atau penyuluhan penyampaian materi, apakah berjalan dengan baik dan efektif ?
9. Apakah dengan bantuan PKH masyarakat dapat terbantu?
10. Apakah menurut bapak/ibu pelaksanaan PKH sudah tepat sasaran?

Daftar wawancara untuk pendamping PKH:

1. Sudah berapa lama program keluarga harapan (PKH) ini berjalan di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?
2. Apakah anda paham mengenai Program Keluarga Harapan?
3. Bagaimana penerapan bantuan dalam program keluarga harapan (PKH)?
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga penerima Manfaat (KPM) PKH?
5. Bagaimana proses dalam pelaksanaan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ?
6. Bagaimana ciri-ciri orang yang berhak menerima PKH?
7. Dalam bentuk apa PKH yang diterima oleh masyarakat?
8. Berapa total bantuan yang diterima oleh Keluarga penerima Manfaat (KPM) PKH?
9. Bagaimana Jika Peserta PKH Tidak Memenuhi Kewajiban?
10. Apakah pelaksanaan PKH sudah tepat sasaran di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu?
11. Apa saja kendala dalam pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu?
12. Bagaimana pendapat anda tentang pemberian PKH kepada orang yang tidak berhak menerimanya, dan bagaimana solusinya agar itu tidak terjadi?

Bengkulu, 09 Februari 2022

Penulis



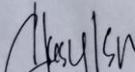
Iga Atriani

NIM. 1811130138

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Dr. Desi Isnaini, M.A

NIP. 197412022006042001



Khairiah el Wardah, M.Ag

NIP. 197808072005012008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) yang disusun oleh:

Nama : Iga Atriani
NIM : 1811130138
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Desi Ikhaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Khairiah el Wardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, E.k
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0247/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/02/2022 Bengkulu, 15 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua RW.09 Kelurahan Kandang
Mas Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu.

di-

Tempat

Assalamu 'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Iga Atriani
NIM : 1811130138

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Pendistribusian Dana Program Keluarga
Harapan (PKH) Dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada Rw.09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu).

Tempat Penelitian : Rw.09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengotahui
Wakil Dekan

Nurul Haki



SURAT PERNYATAAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang surat izin penelitian, dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Iga Atriani
NIM : 1811130138
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa yang bersangkutan di atas benar telah melakukan penelitian di RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu selama satu bulan terhitung dari tanggal 1 Maret 2022 sampai 30 Maret 2022, untuk memperoleh hasil wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 30 Maret 2022

Mengetahui

Ketua RW 09 Kel. Kandang Mas
Kec. Kampung Melayu Kota
Bengkulu



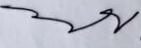
JHON FAALDI.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pinggir Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmawatisukarno.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : Senin /13 Juni 2022
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah / VIII

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Iga Atriani NIM.1811130138	 Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM NIP. 198508072015031005

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, E.k
NIP. 198505222019032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Iga Atriani
NIM : 1811130138
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian Munaqosah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 23 Juni 2022
Kaprodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, E.k
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 40/SKLP-FEBI/017/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Iga Atriani
NIM : 1811130138
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)
Similarity Index : 13. %
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA.Ek.
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iga Atriani
NIM : 1811130138
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, M.A
Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)

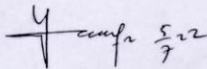
No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Jumat 04-02-2022	BAB I	Perbaiki metode penelitian	
2.	Rabu 09-02-2022	BAB II	1. Perbaiki penulisan ayat Alquran dan terjemahan. Lihat pedoman FEBI 2. Perbaiki footnote	
3.	Jumat 3-06-2022	BAB II	Perbaiki daftar isi, spasi, Perbaiki ayat Alquran	
4.	Senin 06-06-2022	BAB II	Beri footnote pada hadis	

5.	Rabu 08-06-2022	BAB III	Perbaiki spasi dan penulisan	AK
6.	Kamis 16-06-2022	BAB IV	Cantumkan sumber catatan kaki	AK
7.	Senin 20-06-2022	BAB IV V	Perbaiki footnote	AK
8.	Kamis 23-06-2022		ACC	AK

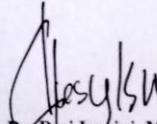
Bengkulu, Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Pembimbing I



Yenti Sumarni M.M
NIP. 197904162007012020



Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfatbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iga Atriani
NIM : 1811130138
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing II : Khairiah Elwardah, M.Ag
Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa 25-01-2022	BAB I	Perjelas latar belakang	
2.	Kamis 27-01-2022	BAB I	1. Rumusan dan tujuan masalahnya dipecah lagi menjadi 3 2. Perbaiki ayat Alquran	
3.	Kamis 3-02-2022	BAB II	Tambahkan catatan kaki dan perbaiki penggunaan kata depan	
4.	Senin 7-02-2022	BAB III	1. Tambahkan data tentang objek penelitian 2. Catatan kaki diperbaiki	

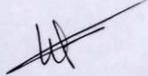
5.	Rabu 13-04-2022	BAB IV	1. Tabelkan pembahasan tentang penerima PKH 2. Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalahnya	
6.	Jumat 22-04-2022	BAB V	Perbaiki kesimpulan 1 dan 2	
7.	Senin 23-05-2022	BAB V	Perbaiki data orangnya dan perbaiki sarannya	
8.	Jumat 27-05-2022		ACC ke pembimbing I	

Bengkulu, 30 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Pembimbing II


Yenti Sumarni M.M
NIP. 197904162007012020


Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Dokumentasi Penelitian









